



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



# LKjIP

# 2022

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG



<http://dinasosialbuleleng.go.id>



[dinasosialbuleleng@gmail.com](mailto:dinasosialbuleleng@gmail.com)



(0362) 2048



Dinas Sosial Kab. Buleleng



[dinasosial](#)



Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

## KATA PENGANTAR

Pelaporan merupakan bagian penting dari serangkaian proses perencanaan suatu kegiatan, yang memuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan suatu organisasi. Pelaporan Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan dan kinerja keuangan, sekaligus merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan laporan pelaksanaan hasil kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2017-2022.

Tidak dapat dipungkiri bahwa capaian kinerja program kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2022 belum mencapai hasil maksimal. Dengan demikian Laporan Kinerja menjadi bagian dari sistem pengendalian administrasi pemerintahan, yang diharapkan mampu menggambarkan kinerja dinas baik yang berhasil maupun yang pencapaiannya belum maksimal, dengan harapan ada perbaikan di masa mendatang.

Singaraja, Desember 2022

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



I Putu Karizman Putra, S.Sos, MM.

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	1
1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah .....	1
1.4 Isu Strategis .....	2
1.5 Struktur Organisasi .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	7
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	8
2.3 Perjanjian Kinerja .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>14</b>
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	14
3.1.1 Rumus yang digunakan .....	15
3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja .....	16
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	16
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dengan membandingkan kondisi 5 (lima) tahun terakhir serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi .....	20
3.4 Akuntabilitas Keuangan dengan Analisis Pencapaian Keberhasilan/Kegagalan dan Tingkat Efisiensi .....	25
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>23</b>
4.1 Simpulan .....	27
4.2 Langkah Perbaikan ke Depan .....	27

## **LAMPIRAN**

- 1) Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2) Lampiran Perjanjian Kinerja
- 3) Lampiran Hasil Pengukuran Kinerja (CRAAPK)
- 4) Prestasi yang dicapai 3 (tiga) tahun terakhir

## **DAFTAR GAMBAR**

Struktur Organisasi Dinas Sosial .....	6
--	---

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng....	8
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 2022 .....	10
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2022 ....	13
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 .....	16
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2022 .....	17
Tabel 3.3 Indikator Sasaran Strategis, Target Kinerja, Realisasi Kinerja dan Capaian RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 .....	18
Tabel 3.4 Perhitungan Capaian Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.....	18
Tabel 3.5 Indikator Sasaran Strategis, Target Kinerja, Realisasi Kinerja dan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ...	19
Tabel 3.6 Perhitungan Capaian Sasaran Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.....	19
Tabel 3.7 Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 .....	20
Tabel 3.8 Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2022.....	22
Tabel 3.9 Capaian Realisasi Anggaran .....	25

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pelayanan masyarakat berorientasi kepada visi, misi dan tujuan suatu organisasi, dengan memperhitungkan kekuatan, hambatan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin terjadi. Penyelenggaraan program kegiatan di bidang/ urusan sosial pada Dinas Sosial sebagaimana ditetapkan Penetapan Kinerja tahun 2022.

Penetapan kinerja memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, target yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang bersifat operasional, dengan mengacu pada Renstra 2017-2022 dan Rencana Kerja tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan target yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa rata-rata sasaran tercapai dengan predikat sangat berhasil. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran di bidang sosial antar lain:

1. Terjalinnnya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah sosial dengan instansi terkait antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, Polres dan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, serta lembaga-lembaga sosial.
2. Tingginya peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial antara lain Pekerja Sosial Profesional, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna (KT), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Tenaga Kersejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan dunia usaha.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui lembaga sosial dalam penanganan masalah sosial, antara lain Panti Asuhan, Corporate Social Responcibility (CSR) Dunia Usaha, Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Buleleng dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya.

Meskipun pencapaian sasaran relatif berhasil, namun demikian masih terdapat permasalahan sosial yang menjadi tantangan, diantaranya adalah:

1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih relatif besar dengan permasalahan yang semakin kompleks.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

#### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari pembuat laporan kinerja adalah

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja, maka Dinas Sosial mempunyai tugas pokok :  
”Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial” yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang sosial yang berhubungan dengan :

- a. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- b. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### 1.4 Isu Strategis

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Sosial. Sedangkan dari segi teknis, fungsi yang diselenggarakan mencakup: Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati; Pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya permasalahan sosial; Pelaksanaan rehabilitasi penyandang permasalahan sosial; Pemberian pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial; Pemberian perijinan di bidang sosial sesuai dengan kewenangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dinas sosial Kabupaten Buleleng, telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan baik yang menyangkut pelayanan sosial, pemberdayaan lembaga sosial maupun pembinaan karang taruna serta yang berkaitan dengan penataan dan pelestarian monumen serta penghayatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.

Program yang dilaksanakan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta mengurangi timbulnya masalah sosial baru. Program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya penanganan Isu Strategis yaitu penanggulangan kemiskinan, penanggulangan penyandang cacat, penanggulangan keterlantaran, penanganan ketunaan sosial,

penanggulangan bencana alam/sosial termasuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan.

Program dan kegiatan tersebut akan menjawab terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Buleleng terhadap program-program unggulan nasional sebagaimana dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial maupun pencapaian SDGs dalam penanggulangan kemiskinan.

Kondisi PMKS di Kabupaten Buleleng cenderung mengalami penurunan, namun di beberapa kategori mengalami kenaikan. Hal ini diakibatkan karena kompleksnya masalah sosial sehingga perlu penanganan yang terpadu. Berbagai kebijakan dan program serta kegiatan terus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud, seperti meningkatkan kemampuan PMKS, Organisasi Sosial / Panti Sosial dan memulihkan kehidupan sosial ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Secara umum capaian kinerja Dinas Sosial telah dapat mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pola penanganan yang dikembangkan tersebut dapat berupa Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Bantuan Perbaikan Gizi (sembako) bagi anak terlantar/anak balita terlantar, lanjut usia terlantar, keluarga miskin, penyandang cacat, wanita rawan sosial ekonomi, anak nakal, maupun pembinaan terhadap panti sosial/orsos guna meningkatkan kapasitas maupun kualitas kehidupannya. Sedangkan, untuk penanganan kepada eks para korban diberikan advokasi, bimbingan, motivasi sosial dan keterampilan praktis sesuai dengan potensi keterampilan dasar yang dimiliki serta potensi daerah masing-masing seperti beternak babi/kambing/sapi dan seterusnya .

Terhadap beberapa kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mengalami kenaikan seperti bertambahnya kasus Penyandang HIV/AIDS dan bahkan penyebarannya sampai keseluruhan wilayah kecamatan. Hal ini diakibatkan karena kondisi dan perkembangan globalisasi yang disalahgunakan. Namun demikian semua bentuk permasalahan sosial tersebut di atas, telah diupayakan penanganannya secara bertahap, terpadu dan berkesinambungan dengan SKPD/ Lembaga terkait .

Tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Sosial antara lain:

- a. Jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat kemiskinan yang juga cukup tinggi dengan sebaran yang begitu luas merupakan tantangan dalam upaya penanggulangan/pengentasannya.
- b. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan utamanya peningkatan akibat migrasi dari Luar Bali (Jatim) tidak dapat dipungkiri akan memunculkan kerawanan sosial;
- c. Penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial (Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan lain lain) merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan kapasitasnya sehingga mereka bisa berdaya dan mandiri dalam menjalani kehidupannya;
- d. Rentannya wilayah Buleleng terhadap Bencana Alam dan bahkan setiap tahun sering terjadi di beberapa wilayah kecamatan, hal ini menjadi tantangan dalam upaya penanganan masalah sosial akibat bencana dimaksud.
- e. Belum dimilikinya rumah singgah yang dipergunakan untuk menampung para tuna sosial (WTS, Gepeng, orang terlantar luar daerah dan penyelamatan korban eksploitasi anak dan perempuan).
- f. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Buleleng maka permasalahan kesejahteraan sosial tidak akan dapat ditanggulangi dalam waktu singkat.

Walaupun masalah sosial tidak dapat di hentikan ataupun di stop karena sifatnya yang dinamis sejalan dengan dinamika kehidupan manusia, namun Dinas Sosial Kabupaten Buleleng senantiasa mengupayakan penanganan maupun pengelolaan sehingga masalah sosial ataupun kerawanan sosial di Kabupaten Buleleng dapat di eliminir sejalan dengan tupoksi yang diembannya dengan mengoptimalkan peluang yang ada dilingkungan eksternalnya.

Adapun peluang dimaksud adalah:

- a. Adanya jalinan koordinasi yang sangat mantap dari berbagai SKPD terkait dalam penanganan masalah sosial.
- b. Partisipasi lembaga sosial/organisasi sosial dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial;

- c. Adanya pedoman ataupun kebijakan yang menjadi pegangan dalam penanganan masalah sosial, sehingga penanganannya menjadi lebih jelas terarah dan dapat dipertanggungjawabkan
- d. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah, baik Dari APBD Kabupaten Buleleng, APBD Provinsi Bali maupun APBN

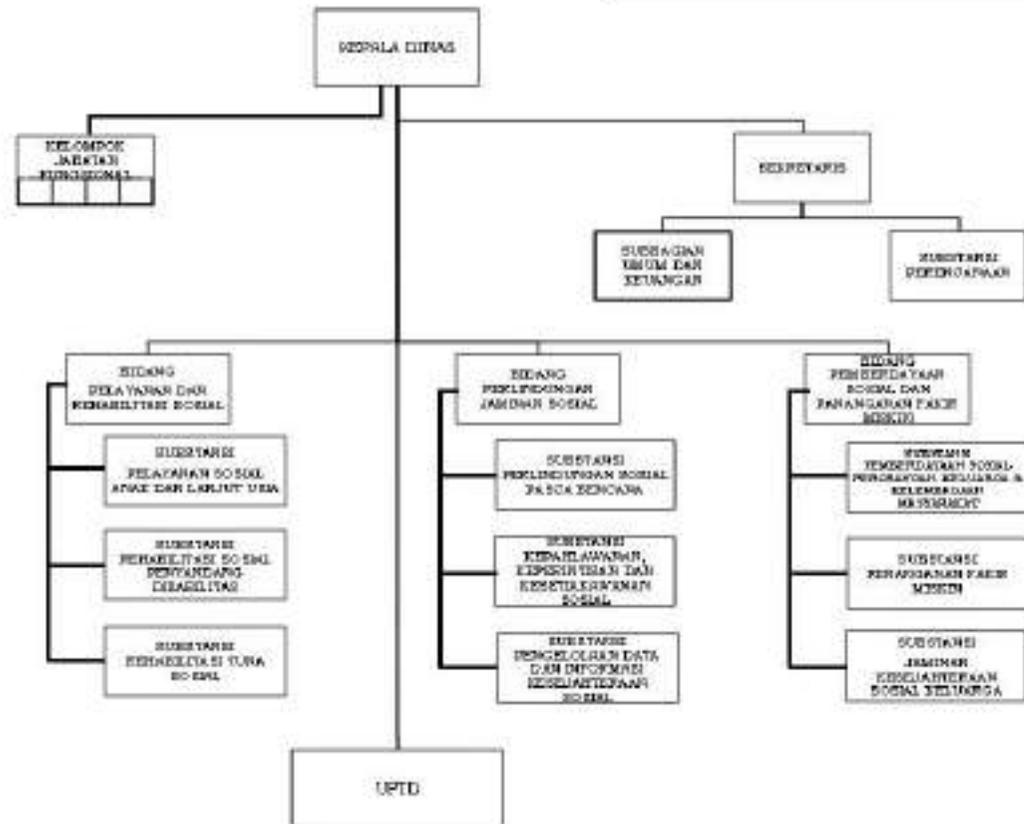
## **1.5 Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, membawahi:
  - 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
  - 2. Substansi Perencanaan;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:
  - 1. Substansi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  - 2. Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
  - 3. Substansi Rehabilitasi Tuna Sosial;
- e. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi:
  - 1. Substansi Perlindungan Sosial Pasca Bencana;
  - 2. Substansi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
  - 3. Substansi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
  - 1. Substansi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
  - 2. Substansi Penanganan Fakir Miskin; dan
  - 3. Substansi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL TIPE B

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 52 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
BERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI BULELENG.  
  
 PUTU AGUS SURADNYANA



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis 2017-2022, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng telah menetapkan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan sosial yang menjadi Urusan Sosial yang ada di Kabupaten Buleleng.

Adapun Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dan menjadi tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu “Pertumbuhan ekonomi yang inklusif“, dengan sasaran strategis pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin, dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase PMKS yang tertangani, dengan target: 5,80%
  - b. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial: 20,50%

Namun dari hasil reuiu pohon kinerja maka sasaran strategis pada dinas sosial mengalami perubahan, sasaran strategis pada Dinas Sosial tahun 2022, sebagai berikut:

1. Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan target: 0,63%
2. Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif, dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif, dengan target: 80%

## 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU), instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dirumuskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1.	Meningkatnya efektifitas Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase (%) Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	a. Cara Pengukuran: (Jumlah PMKS tahun sebelumnya dikurangi jumlah PMKS tahun sekarang) di bagi jumlah PMKS tahun sebelumnya di kalikan 100% b. Tipe penghitungan: Mandiri per tahun c. Sumber data: Dinas Sosial d. Alasan: Sesuai Dengan 1. UU RI Nomor: 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial

			2. Permensos : 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)
--	--	--	---

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2022 dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 2022

Sasaran / Capaian Program		Target / Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan	
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output			
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9	
I.	Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0,63%	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, Persentase panti asuhan yang mendapat pembinaan, persentase psks yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial, persentase pmks yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	1.362.637.000	Jumlah dokumen Fakir Miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Jumlah Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Jumlah PMKS yang diberikan bantuan, Jumlah SDM Desa/ Kelurahan yang dilatih	Jumlah PMKS penerima sembako, Jumlah fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP, Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin	781.097.000	
								Jumlah dokumen jaminan sosial dan bantuan sosial, Jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial dan bantuan sosial	jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial dan bantuan sosial	581.540.000	
				Program rehabilitasi sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan, persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani	2.355.669.000	Jumlah dokumen anak terlantar, lansia terlantar, anak nakal yang tersedia,	jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	778.901.000	
								Jumlah dokumen penyandang disabilitas, Jumlah penyandang disabilitas yang diberikan bantuan, Jumlah penyandang disabilitas yang dilatih	jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma	841.857.000	
								Jumlah Lansia terlantar yang diberikan bantuan, Jumlah anak nakal, anak terlantar yang dilatih	jumlah anak nakal, anak terlantar yang mendapat pelatihan dan keterampilan praktek belajar kerja	586.305.000	
								Jumlah penyandang disabilitas yang dilatih	jumlah pelatihan bagi para penyandang disabilitas dan bantuan sosial	148.606.000	

Sasaran / Capaian Program		Target / Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output		
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9
					Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan , persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani	375.541.000	Tersedianya data tuna sosial	jumlah eks napi yang mendapat pelatihan keterampilan	133.965.000	
							Terlaksananya pemberian bantuan PMKS	jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial ,	212.294.000	
							Terlaksananya pelatihan PMKS	jumlah pemberdayaan eks. Penyandang penyakit sosial	29.282.000	
			Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	43.923.000	jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial hukum berupa sosialisasi	jumlah pemberdayaan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial hukum berupa sosialisasi	43.923.000	
			Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	439.230.000	Jumlah dokumen penduduk miskin, Jumlah Desa/ Kelurahan yang mendapat pelatihan SIK-NG	Jumlah pemutakhiran data penduduk miskin	439.230.000	
			Program Penanganan bencana		persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	280.499.000	Jumlah dokumen penanganan bencana dan kejadian luar biasa, Jumlah bantuan sosial yang diberikan kepada korban bencana, Jumlah korban bencana yang diberikan bantuan	Jumlah penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat , kejadian luar biasa dan bantuan sosial yang tidak direncanakan	280.499.000	



### 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2022 yang telah ditetapkan dan menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS (PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0,63%
II.	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif.	80,00%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Sosial	1.275.980.139	APBD II
2	Program Rehabilitasi Sosial	1.540.942.211	APBD II
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.375.736.910	APBD II
4	Program Penanganan Bencana	249.582.484	APBD II
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.158.498.185	APBD II



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut.

**Cover**

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**Daftar Tabel**

**Daftar Gambar**

**Ringkasan Eksekutif**

**Bab I**

**Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Struktur Organisasi

**Bab II**

**Perencanaan Kinerja**

- 2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3 Perjanjian Kinerja

**Bab III**

**Akuntabilitas Kinerja**

- 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
  - 3.1.1 Rumus yang digunakan
  - 3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja
- 3.2 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dengan membandingkan kondisi 5 (lima) tahun terakhir serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi
- 3.4 Akuntabilitas Keuangan dengan

Analisis Pencapaian  
Keberhasilan/Kegagalan dan Tingkat  
Efisiensi

**Bab IV Penutup**

4.1 Simpulan

4.2 Langkah Perbaikan ke Depan

**Lampiran**

- 1) Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2) Lampiran Perjanjian Kinerja
- 3) Lampiran Hasil Pengukuran Kinerja (CRAAPK)
- 4) Prestasi yang dicapai 3 (tiga) tahun terakhir

**3.1.1 Rumus yang digunakan**

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan dengan formulasi tertentu dan difokuskan pada indikator kinerja strategis.

Rumus pengukuran realisasi capaian kinerja indikator sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut.

1. Persentase PMKS yang tertangani  $= \frac{\Sigma \text{PMKS yang tertangani}}{\Sigma \text{PMKS yang ada}} \times 100\%$
2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial  $= \frac{\Sigma \text{PMKS yang diberikan bantuan}}{\Sigma \text{PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$

Rumus pengukuran Realiasi capaian kinerja indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

1. Persentase PMKS yang tertangani  $= \frac{\Sigma \text{PMKS yang tertangani}}{\Sigma \text{PMKS yang ada}} \times 100\%$
2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial  $= \frac{\Sigma \text{PMKS yang diberikan bantuan}}{\Sigma \text{PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$

### 3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja

Penetapan cara pengukuran predikat nilai capaian kinerja meliputi:  
Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut:

- Capaian kinerja > 85 sd 100% : Sangat berhasil
- Capaian kinerja >70 sd <85% : Berhasil
- Capaian kinerja >55 sd <70% : Cukup berhasil
- Capaian kinerja < 55 sd 0% : Tidak berhasil

### 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program. Adapun uraian sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran  
RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	a. Persentase PMKS yang tertangani b. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran  
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	a. Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		2. Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	a. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif

### Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022

#### 1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022:

Realisasi capaian kinerja indikator sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Tahun 2022 dengan target, realisasi dan pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3 Indikator Sasaran Strategis, Target Kinerja, Realisasi Kinerja dan Capaian RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

No	Indikator Sasaran Startegis	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
1.	Persentase PMKS yang tertangani	5,80	62,75	1.081,93
2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	20,50	62,01	302,50

Dari uraian tabel tersebut diatas capaian kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2022, rata-rata capaian dari ke dua indikator sasaran tersebut adalah 692,22% dengan skala kriteria diperoleh dengan predikat sangat berhasil. Realisasi dan pencapaian kinerja diperoleh dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Perhitungan Capaian Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng  
Tahun 2017-2022

No	Uraian	Perhitungan Capaian Sasaran
1.	Persentase PMKS yang tertangani	$= \frac{\sum \text{PMKS yang tertangani}}{\sum \text{PMKS yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{8.998}{14.339} \times 100\%$ $= 62,75 \%$
2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	$= \frac{\sum \text{PMKS yang diberikan bantuan}}{\sum \text{PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$ $= \frac{8.892}{14.339} \times 100\%$ $= 62,01 \%$

Realiasi capaian kinerja indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2022, dengan target, realisasi dan pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5 Indikator Sasaran Strategis, Target Kinerja, Realisasi Kinerja dan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

No	Indikator Sasaran Startegis	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
1.	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0,63	13,95	2.215,07
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	80	80	100

Dari uraian tabel tersebut diatas capaian kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2022, rata-rata capaian dari ke dua indikator sasaran tersebut adalah 1.157,54% dengan skala kriteria diperoleh dengan predikat sangat berhasil. Realisasi dan pencapaian kinerja diperoleh dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perhitungan Capaian Sasaran Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

No	Uraian	Perhitungan Capaian Sasaran
1.	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	$= \frac{\sum \text{PMKS penerima bantuan sosial}}{\sum \text{Jumlah PMKS Tahun sekarang}} \times 100\%$ $= \frac{2.001}{14.339} \times 100\%$ $= 13,95 \%$
2.	Persentase Potensi Sumber	$= \frac{\sum \text{PSKS yang aktif}}{\sum \text{Jumlah PSKS Tahun sekarang}} \times 100\%$ $= \frac{218}{272} \times 100\%$ $= 80 \%$

No	Uraian	Perhitungan Capaian Sasaran
	Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	

### 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dengan membandingkan kondisi 5 (lima) tahun terakhir serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi

#### 1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 memiliki Sasaran “Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin” yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu persentase PMKS yang tertangani dan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial. Realisasi capaian kinerja indikator sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, untuk capaian realisasi indikator sasaran strategis dari tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7 Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis  
RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

No	Indikator Sasaran Startegis	Realisasi Capaian (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase PMKS yang tertangani	79,37	175	159	74,24	1.081,93
2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	96,38	41,10	38	18,73	302,50

Bila dilihat dari capaian realisasi kinerja dari tahun 2018-2022, maka rata-rata realisasi capaian kinerja tahun 2018 adalah 87,87% tahun 2019 adalah 108,5% tahun 2020 adalah 98,5% tahun 2021 46,48% dan tahun 2022 adalah 692,22% ini berarti capaian kinerja tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sangat berhasil, tahun

2021 capaian kinerjanya tidak berhasil dan tahun 2022 capaian kinerjanya sangat berhasil.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran “Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin” meliputi 2 (dua) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 692,22%, dengan predikat sangat berhasil.

a. Persentase PMKS yang tertangani

Realisasi pencapaian Persentase PMKS yang tertangani untuk tahun 2022 sebesar 62,75% diperoleh dari jumlah PMKS yang tertangani (8.998 Orang) dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada (14.339 Orang, berdasarkan data PMKS per Oktober 2022) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 1.081,93%.

Jumlah PMKS yang tertangani sebesar 8.892 orang di dapatkan dari pemberian sembako isidentil kepada Fakir Miskin sebesar 418 orang, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir miskin berupa bantuan bibit babi untuk 3 KUBE sebanyak 30 Orang, sembako isidentil untuk lanjut usia sebanyak 300 orang, isidentil untuk penyandang disabilitas 575 orang, alat bantu untuk penyandang disabilitas 48 orang, sembako isidentil untuk anak terlantar sebanyak 300 orang, sembako isidentil untuk eks nabi 130 orang, sembako untuk Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) sebanyak 200 orang, penanganan gelandangan dan pengemis sebanyak 100 orang, bantuan sosial uang (BSU) untuk Fakir Miskin sebanyak 6.441 keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan buffer stock bencana 450 orang, penguburan mayat terlantar 5 orang dan pemulangan orang terlantar sebanyak 1 orang.

b. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Realisasi pencapaian Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk tahun 2022 sebesar 62,01% diperoleh dari jumlah PMKS yang diberikan bantuan (8.892 Orang) dibandingkan dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan (14.339 Orang, berdasarkan data PMKS per Oktober 2022) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 302,50%.

Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sebesar 8.892 orang di dapatkan dari pemberian sembako isidentil kepada Fakir Miskin sebesar 418 orang, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir miskin berupa bantuan bibit babi untuk 3 KUBE sebanyak 30 Orang, sembako isidentil untuk lanjut usia sebanyak 300 orang, isidentil untuk penyandang disabilitas 575 orang, alat bantu untuk penyandang disabilitas 48 orang, sembako isidentil untuk anak terlantar sebanyak 300 orang, sembako isidentil untuk eks napi 130 orang, sembako untuk Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) sebanyak 200 orang, bantuan sosial uang (BSU) untuk Fakir Miskin sebanyak 6.441 keluarga penerima manfaat (KPM) dan bantuan buffer stock bencana 450 orang.

Berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2019-2022 yang memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu “Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” dengan indikator Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan sasaran “Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif” dengan indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif. Realiasi capaian kinerja indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2019-2022, untuk capaian realisasi tahun 2021 – 2022 sebagai berikut.

Tabel 3.8 Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja  
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2022

No	Indikator Sasaran Startegis	Realisasi Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022
1.	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100	36.51	574,60	2.215,07
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100	100	100	100

Bila dilihat dari capaian realisasi kinerja dari tahun 2019-2022, maka rata-rata realisasi capaian kinerja tahun 2019 adalah 100% tahun 2020 adalah 50,77% tahun 2021 adalah 337,30% dan tahun 2022 adalah 1.157,54 ini berarti capaian kinerja tahun 2019 adalah sangat berhasil, tahun 2020 adalah tidak berhasil, tahun 2021 dan 2022 adalah sangat berhasil.

Sasaran “Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 2.215,07%, dengan predikat Sangat Berhasil.

a. Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Realisasi pencapaian Persentase Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk tahun 2022 sebesar 13,95% diperoleh dari jumlah PMKS penerima bantuan sosial (2.001 Orang) dibandingkan dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan (14.339 Orang, berdasarkan data PMKS per Oktober 2022) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 2.215,07%.

Jumlah PMKS penerima bantuan sosial sebesar 2.001 orang di dapatkan dari pemberian sembako isidentil kepada Fakir Miskin sebesar 418 orang, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir miskin berupa bantuan bibit babi untuk 3 KUBE sebanyak 30 Orang, sembako isidentil untuk lanjut usia sebanyak 300 orang, isidentil untuk penyandang disabilitas 575 orang, alat bantu untuk penyandang disabilitas 48 orang, sembako isidentil untuk anak terlantar sebanyak 300 orang, sembako isidentil untuk eks napi 130 orang, sembako untuk Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) sebanyak 200 orang.

Sasaran “Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif”.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif meliputi 1

(satu) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%, dengan predikat Sangat Berhasil

**a. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif**

Realisasi pencapaian Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif sebesar 80%, diperoleh dari jumlah PSKS yang aktif (218) dibandingkan dengan jumlah PSKS tahun sekarang (272) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 100%.

Pencapaian target indikator sasaran dilaksanakan melalui program berikut:

1. Program pemberdayaan sosial
2. Program rehabilitasi sosial
3. Program perlindungan dan jaminan sosial
4. Program penanganan bencana
5. Program pengelolaan taman makam pahlawan

**2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- a. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah sosial dengan instansi terkait antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, Polres dan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, serta lembaga-lembaga sosial.
- b. Tingginya peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial antara lain Pekerja Sosial Profesional, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna (KT), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan dunia usaha.
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui lembaga sosial dalam penanganan masalah sosial, antara lain Panti Asuhan, Corporate Social Responsibility (CSR) Dunia Usaha, Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Buleleng dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya.
- d. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah sosial dengan instansi terkait antara lain Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Bali, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain :

- a. Belum Validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- b. Belum maksimalnya Desa / Kelurahan dalam melaksanakan musdes/muskel
- c. Terbatasnya sumberdaya pelaksanaan kegiatan penanganan PMKS.
- d. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan PMKS.

### 3. Solusi

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, upaya/ alternative yang dilakukan antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data ke Desa / Kelurahan dalam pelaksanaan musdes/muskel untuk perbaikan data DTKS
- b. Mengoptimalkan kinerja sumberdaya pelaksana dan meningkatkan kerjasama dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta pendamping PKH (Program Keluarga Harapan).
- c. Bekerjasama dengan pihak ketiga (CSR) dalam menangani PMKS

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan dengan Analisis Pencapaian Keberhasilan/Kegagalan dan Tingkat Efisiensi

#### 1. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran dari sasaran strategis pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
I	Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan	Program Pemberdayaan Sosial	1.275.980.139	1.255.431.773	98,39

NO	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
	sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Program rehabilitasi sosial	1.540.942.211	1.213.767.313	78,77
		Program Perlindungan dan jaminan sosial	6.375.736.910	3.172.806.789	49,76
		Program Penanganan bencana	249.582.484	244.146.770	97,82
II	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Program Pemberdayaan Sosial	1.275.980.139	1.255.431.773	98,39
		Program Penanganan bencana	249.582.484	244.146.770	97,82

## 2. Analisis Pencapaian Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan/kegagalan realisasi keuangan

1. Karena ada masyarakat yg tidak mengambil bantuan sehingga uang dikembalikan ke kas daerah
2. Karena pembagian pagu sumber dana DID di awal desember sehingga tidak bisa dilaksanakan pada desember 2022

## 3. Tingkat Efisiensi Anggaran

Dalam belanja barang dan jasa menggunakan harga sesuai dengan hasil konsolidasi dan E-Katalog Lokal sehingga ada efisiensi belanja.



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Dengan memperhatikan hasil analisis Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagaimana diuraikan dalam BAB III Akuntabilitas Kinerja, secara makro pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan benar, serta mengarah kepada pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yakni ***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”***.

Namun demikian, terdapat beberapa sasaran yang belum tercapai yang akan diupayakan perbaikannya. Penataan ulang terhadap perancangan program dan kegiatan di tahun mendatang yang mengarah pada penanganan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama.

Menyadari hal tersebut, langkah mengoptimalkan kinerja aparatur dan memobilisasi peran para pemangku kepentingan diperlukan agar hasil program, kegiatan dan keluaran sub kegiatan semakin bermanfaat dan tepat sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan pembuatan laporan ini dimasa mendatang.

### **4.2 Langkah Perbaikan ke Depan**

Diharapkan agar anggaran yang diberikan kepada OPD sesuai dengan sasaran SPM yang dimiliki oleh OPD tersebut.



**Lampiran 1.**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL**  
**TAHUN 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1.	Meningkatnya efektifitas Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase (%) Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<p>a. Cara Pengukuran:            (Jumlah PMKS tahun sebelumnya dikurangi jumlah PMKS tahun sekarang) di bagi jumlah PMKS tahun sebelumnya di kalikan 100%</p> <p>b. Tipe penghitungan :            Mandiri per tahun</p> <p>c. Sumber data :            Dinas Sosial</p> <p>d. Alasan:            Sesuai Dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI Nomor: 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial</li> <li>2. Permensos : 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)</li> </ol>



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS SOSIAL**  
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248  
SINGARAJA

Web : [dinsos.bulelengkab.go.id](http://dinsos.bulelengkab.go.id)

Email : [dinsos@bulelengkab.go.id](mailto:dinsos@bulelengkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A

Jabatan : Pj. Bupati Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 22 Desember 2022

PIHAK KEDUA,  
  
Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A

PIHAK PERTAMA,  
  
I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199103 1 053

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN STRATEGIS (PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0,63%
II.	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif.	80,00%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pemberdayaan Sosial	Rp 1.275.980.139	APBD II
2 Program Rehabilitasi Sosial	Rp 1.540.942.211	APBD II
3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 6.375.736.910	APBD II
4 Program Penanganan Bencana	Rp 249.582.484	APBD II
5 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 1.158.498.185	APBD II

Singaraja, 22 Desember 2022

Pj. Bupati Buleleng,  
  
**Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A**

Kepala Dinas Sosial,  
  
**I Putu Kartaman Putra, S.Sos, MM**  
 Pembina Tk.I (IV/b)  
 NIP. 19691231 199103 1 053

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
BULAN JANUARI S/D DESEMBER DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Eselon II</b>																
<b>Kepala Dinas</b>																
1	Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	0,63	Januari	-	-	-		Program Pemberdayaan Sosial	1.275.980.139	Januari	27.484.056	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	79.152.121	21.103.951	26,66	Administrasi masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	834.708.997	41.677.902	4,99	Administrasi masih dalam proses
					April	-	-	-				April	867.702.973	829.787.550	95,63	Sisa Pajak PPN
					Mei	-	-	-				Mei	916.166.949	839.021.188	91,58	Administrasi masih dalam proses
					Juni	0,15	1,9	1267	karena banyaknya permintaan sembako dari masyarakat			Juni	968.905.925	861.895.139	88,96	Administrasi masih dalam proses
					Juli	-	-	-				Juli	1.009.729.901	932.915.090	92,39	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	-	-	-				Agustus	1.049.558.877	958.789.041	91,35	Administrasi masih dalam proses
					September	0,3	2,84	947	karena banyaknya permintaan sembako dari masyarakat			September	1.088.637.853	994.944.882	91,39	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	-	-	-				Oktober	1.233.698.350	1.021.015.133	82,76	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	-	-	-				Nopember	1.256.606.464	1.041.889.084	82,91	Administrasi masih dalam proses
					Desember	0,63	13,95	2.215,07	karena banyaknya permintaan sembako dari masyarakat, adanya bantuan sosial uang (BSU) kepada masyarakat akibat inflasi			Desember	1.275.980.139	1.255.431.773	98,39	Sisa Pajak PPN
										Program Rehabilitasi Sosial	1.540.942.211	Januari	35.738.203	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
												Pebruari	131.530.573	20.122.364	15,30	Administrasi masih dalam proses
												Maret	485.684.270	57.476.740	11,83	Administrasi masih dalam proses

												April	680.015.355	168.600.101	24,79	Administrasi masih dalam proses
												Mei	715.483.552	545.132.791	76,19	Administrasi masih dalam proses
												Juni	756.186.749	581.517.155	76,90	Administrasi masih dalam proses
												Juli	899.203.196	625.418.233	69,55	Administrasi masih dalam proses
												Agustus	933.771.093	721.954.797	77,32	Administrasi masih dalam proses
												September	970.414.289	758.485.786	78,16	Administrasi masih dalam proses
												Oktober	1.143.716.115	813.346.743	71,11	Administrasi masih dalam proses
												Nopember	1.188.534.311	868.367.500	73,06	Administrasi masih dalam proses
												Desember	1.540.942.211	1.213.767.313	78,77	1.Karena pembagian pagu di awal desember sehingga tidak bisa dilaksanakan pada desember 2022
									Program Penanganan Bencana	249.582.484	Januari	16.804.375	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022	
												Pebruari	30.595.143	9.903.197	32,37	Administrasi masih dalam proses
												Maret	60.044.758	20.142.062	33,55	Administrasi masih dalam proses
												April	76.339.133	44.981.378	58,92	Administrasi masih dalam proses
												Mei	85.393.508	46.902.092	54,92	Administrasi masih dalam proses
												Juni	123.594.443	59.882.807	48,45	Administrasi masih dalam proses
												Juli	144.398.818	68.937.172	47,74	Administrasi masih dalam proses
												Agustus	153.453.193	107.444.887	70,02	Administrasi masih dalam proses
												September	187.662.808	139.570.935	74,37	Administrasi masih dalam proses
												Oktober	226.513.733	153.785.300	67,89	Administrasi masih dalam proses
												Nopember	235.568.108	167.764.975	71,22	Administrasi masih dalam proses
												Desember	249.582.484	244.146.770	97,82	Sisa dari Pajak PPN
									Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6.375.736.910	Januari	26.228.390	-	-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022	
												Pebruari	53.417.665	17.099.026	32,01	Administrasi masih dalam proses
												Maret	81.101.652	51.541.300	63,55	Administrasi masih dalam proses
												April	134.012.105	116.157.898	86,68	Administrasi masih dalam proses
												Mei	160.601.380	128.996.108	80,32	Administrasi masih dalam proses

												Juni	188.641.905	157.815.360	83,66	Administrasi masih dalam proses
												Juli	216.325.711	181.606.488	83,95	Administrasi masih dalam proses
												Agustus	242.628.906	210.041.212	86,57	Administrasi masih dalam proses
												September	268.707.601	240.057.046	89,34	Administrasi masih dalam proses
												Oktober	3.503.598.441	335.186.990	9,57	Administrasi masih dalam proses
												Nopember	3.527.793.723	1.315.956.934	37,30	Administrasi masih dalam proses
												Desember	6.375.736.910	3.172.806.789	49,76	1.karena ada masyarakat yg tidak mengambil bantuan sehingga uang dikembalikan ke kas daerah,2. Karena ada masyarakat yang pindah domisili, 3. Karena pembagian pagu di awal desember sehingga tidak bisa dilaksanakan pada desember 2022
2	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	80	Januari	80	80	100		Program Penanganan Bencana	249.582.484	Januari			-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
					Pebruari	80	80	100				Pebruari	30.595.143	9.903.197	32,37	Administrasi masih dalam proses
					Maret	80	80	100				Maret	60.044.758	20.142.062	33,55	Administrasi masih dalam proses
					April	80	80	100				April	76.339.133	44.981.378	58,92	Administrasi masih dalam proses
					Mei	80	80	100				Mei	85.393.508	46.902.092	54,92	Administrasi masih dalam proses
					Juni	80	80	100				Juni	123.594.443	59.882.807	48,45	Administrasi masih dalam proses
					Juli	80	80	100				Juli	144.398.818	68.937.172	47,74	Administrasi masih dalam proses
					Agustus	80	80	100				Agustus	153.453.193	107.444.887	70,02	Administrasi masih dalam proses
					September	80	80	100				September	187.662.808	139.570.935	74,37	Administrasi masih dalam proses
					Oktober	80	80	100				Oktober	226.513.733	153.785.300	67,89	Administrasi masih dalam proses
					Nopember	80	80	100				Nopember	235.568.108	167.764.975	71,22	Administrasi masih dalam proses
					Desember	80	80	100				Desember	249.582.484	244.146.770	97,82	Sisa Pajak PPN
										Program Pemberdayaan Sosial	1.275.980.139	Januari	27.484.056		-	Belum adanya kelengkapan dalam pengadministrasian pertanggung jawaban anggaran 2022
												Pebruari	79.152.121	21.103.951	26,66	Administrasi masih dalam proses
												Maret	834.708.997	41.677.902	4,99	Administrasi masih dalam proses

												April	867.702.973	829.787.550	95,63	Sisa Pajak PPN
												Mei	916.166.949	839.021.188	91,58	Administrasi masih dalam proses
												Juni	968.905.925	861.895.139	88,96	Administrasi masih dalam proses
												Juli	1.009.729.901	932.915.090	92,39	Administrasi masih dalam proses
												Agustus	1.049.558.877	958.789.041	91,35	Administrasi masih dalam proses
												September	1.088.637.853	994.944.882	91,39	Administrasi masih dalam proses
												Oktober	1.233.698.350	1.021.015.133	82,76	Administrasi masih dalam proses
												November	1.256.606.464	1.041.889.084	82,91	Administrasi masih dalam proses
												Desember	1.275.980.139	1.255.431.773	98,39	ada sisa pajak PPN

## PENGHARGAAN YANG DIMILIKI OLEH PERANGKAT DAERAH

1. Juara II Lomba Website Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2022



2. Juara I dalam Lomba Pengelola Kearsipan Tingkat OPD se-Kabupaten Buleleng Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng dari tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 11 April 2022



3. Juara II Dan Harapan II Lomba Utsawa Dharma Gita Bagi Penyandang Disabilitas Se-Bali Dalam Rangka Merayakan Hari Disabilitas Internasional Yang Deselenggarakan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Klungkung Tahun 2021.

